

# KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Saleh Amanto dan Seno Andri

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Contribution Tax to the Regional Income.** This research aims to determine the contribution and the level of effectiveness of the parking tax revenue (PAD) by the Department of Revenue Pekanbaru. In connection with these problems, the study was conducted using interviews, observation and documentation. From the analysis we concluded ample parking tax contributions make a major contribution to the PAD. Parking tax contributions to the Local Revenue for 2012 amounted to 6.06%. This suggests that sufficient parking tax revenues contributed so significantly to the original income, because the original income is still dominated by other PAD legitimate.

**Abstrak: Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan tingkat efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan kontribusi pajak parkir cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2012 sebesar 6,06%. Hal ini memperlihatkan bahwa Pendapatan Pajak Parkir cukup memberikan kontribusi yang begitu berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah.

**Kata Kunci:** kontribusi, potensi pajak dan efektivitas

## PENDAHULUAN

Pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota harus dilakukan secara proporsional melalui pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara merata dan berkeadilan. Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota juga harus diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang didukung dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena hampir semua daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah republik Indonesia dihadapkan dengan masalah keuangan (Nazara, 1997).

Sampai saat ini penerimaan kabupaten/kota, masih didominasi oleh subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. Walaupun berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungannya pada pemerintah pusat dan bertekad menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan otonomi daerah. Akan tetapi berbagai kebijakan dan tekad tersebut belum mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.

Kuncoro (2004) mengungkapkan bahwa realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini ditandai oleh rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian akan menyebabkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Padahal PAD ditinjau dari tugas dan fungsi pemerintah daerah memiliki arti yang strategis, karena disamping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya, akan berkaitan pula dengan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan rakyat akan ditandai antara lain dengan meningkatnya kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi daerah, yang dapat diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah

daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan – badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat.

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah relatif kecil dan pada umumnya total penerimaan daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada pemerintah pusat. Lebih lanjut dikatakan bahwa rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah bukan disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial. Akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak kepada daerah, contoh pajak-pajak yang gemuk menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, misalnya PPN dan Pajak Penghasilan (PPH).

Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah relatif kecil atau secara rata-rata sebesar 11,33% per tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa total penerimaan daerah Kota Pekanbaru didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Dari empat komponen PAD bagi kabupaten/kota pajak daerah memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Masing-masing jenis pajak memiliki kenaikan realisasi pajak yang cukup tinggi. Namun bila dilihat dari perkembangan kota dan banyaknya tempat usaha, perkantoran dan hiburan, pajak parkir memiliki potensi yang tinggi dalam kontribusi pajak untuk daerah.

Potensi ekonomi daerah yang bersumber pada besarnya kegiatan atau usaha perekon-

mian yang berlangsung di suatu daerah kota/kabupaten, ikut mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah setempat yang selanjutnya akan berpengaruh pula kepada kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi (Koswara, 2001). Disamping sumber-sumber ekonomi yang riil dan potensial, kemampuan ekonomi suatu daerah juga banyak dipengaruhi oleh struktur ekonominya. Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah propinsi, kabupaten/kota yang dapat diukur dari: (a) produksi domestik regional bruto (PDRB), (b) penerimaan daerah sendiri (PDS).

Kenaikan PDS akan menaikkan pengeluaran pemerintah, dan hal ini dapat mendorong intensitas dan bobot pembangunan ekonomi. Secara teoritis dengan adanya kenaikan pengeluaran pemerintah akan dapat mendorong proses alokasi dan distribusi yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli (*purchasing power*) masyarakat dan peningkatan konsumsi masyarakat. Kenaikan konsumsi dalam masyarakat akan mendorong kenaikan produksi pada suatu titik tertentu akan diikuti peningkatan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut yang tergambarkan pada peningkatan PDRB. Kenaikan kapasitas perekonomian daerah yang dicerminkan dengan pendapatan regionalnya adalah peningkatan jumlah pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari potensi asli daerah dan dikelola oleh administrasi penerimaan daerah akan meningkat.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menghitung kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah; (2) Menghitung potensi pajak parkir; (3) Menghitung efektivitas pemungutan pajak parkir; dan (4) Mengukur kinerja pajak parkir dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yaitu mempergunakan suatu teori sesuai dengan makna yang ada dan menggunakan karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam teori tersebut. Pendekatan

kuantitatif tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran secara objektif tentang kontribusi dan laju perkembangan pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah dan terhadap PAD serta kinerja pajak parkir Kota Pekanbaru didukung dengan data yang bersifat kualitatif untuk menganalisis administrasi pajak daerah yang dilihat dari aspek kelembagaan (prosedur), kepegawaian dan kegiatan. Sedangkan jenis penelitian dalam yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerimaan pajak parkir dan pelaksanaan administrasi pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk masa Tahun Anggaran 2008 hingga 2012.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Administrasi Pajak Parkir

#### *Tugas Pokok dan Fungsi (Institution)*

Analisis terhadap fungsi dan tugas pokok dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sudah adanya penjabaran tugas pada masing-masing bidang dan seksi.
- b. Rincian tugas yang diberikan terhadap Seksi Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan serta Penetapan sudah jelas.
- c. Koordinasi antar Bidang-Bidang sudah terkelola dengan baik

Pada hakekatnya koordinasi merupakan aplikasi dari prinsip organisasi, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, meskipun secara organisasi kewenangan telah didistribusikan, akan tetapi diperlukan koordinasi masing-masing bidang dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai suatu *team work* yang terpadu.

#### *Sumber Daya Manusia (Person)*

Salah satu faktor penting dalam administrasi perpajakan adalah Sumber Daya Manusia. Operasionalisasi kegiatan pemajakan mulai dari tahap perencanaan, penagihan, penyetoran dan pembukuan atau pelaporan akan sangat dipengaruhi

oleh aparatur yang mengelola bidang perpajakan. Bagaimanapun baiknya dalam system perpajakan yang didesain, baik yang menyangkut institusi, tata laksana, peralatan pendukung, teknologi dan sebagainya, tetapi kuantitas dan kualitas aparat yang terlibat dalam kegiatan administrasi perpajakan tetap merupakan faktor yang paling menentukan. Selain itu operasionalisasi tugas-tugas pemajakan juga dihadapkan pada perkembangan dinamika masyarakat, misalnya dari segi perilaku seperti upaya penghindaran atau penggelapan pajak.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan ini pada akhirnya diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang akan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### *Kegiatan Pemungutan (Activities)*

Kegiatan pemungutan Pajak Daerah yang menjadi wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diselenggarakan oleh unit-unit pengelola melalui seksi-seksi yang ada. Secara berurutan system dan prosedur yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan pemungutan Pajak Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan Pendataan
- b. Penetapan
- c. Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Penagihan

### Penerimaan Pajak Parkir

Seiring berkembangnya perekonomian di Kota Pekanbaru, maka makin banyak pula pusat-pusat hiburan, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat tertentu yang mempunyai lahan parkir yang cukup potensial untuk menambah pendapatan daerah melalui pajak parkir. Berkaitan dengan hal di atas, maka penulis mengembangkan empat persepektif analisis. *Pertama*, analisis empiris perkembangan total penerimaan pajak daerah dan kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah serta kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli

daerah. Kedua, analisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah, laju perkembangannya dan varians penerimaan pajak daerah. Ketiga adalah analisis kinerja pajak daerah yang terdiri dari : tax effort (upaya pajak) yang terdiri dari tax ratio (rasio pajak) dan tax elasticity; dan tax effectiveness (hasil guna pajak). Keempat, analisis unsur-unsur administrasi pajak daerah.

### **Perkembangan Pajak Daerah**

Selama periode 2008 - 2012, pajak daerah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam periode tersebut Pajak Daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 18,51%, dengan pertumbuhan tertinggi pada periode tahun 2012 sebesar Rp28.099.730.577,00 atau 31%. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menganalisis Pajak Daerah adalah juga dengan melakukan analisis terhadap setiap jenis pajak daerah yang ada selama periode tahun penelitian. Jenis pajak daerah yang dianalisis dan dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan pembatasan masalah dibatasi hanya pada Pajak Parkir.

Kontributor terbesar penerimaan pajak daerah di Kota Pekanbaru sepanjang periode 2008 - 2012 adalah Pajak Penerangan Jalan diikuti Pajak Restoran dan Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salomo dan Ikhsan (2002) yang menyebutkan jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. Selanjutnya Salomo dan Ikhsan (2002) menjelaskan bahwa jenis-jenis pajak daerah tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Hal ini dapat terlihat dari struktur perekonomiannya yang merupakan campuran antara sektor primer (pertanian) dengan sektor sekunder dan tertier (industri dan perdagangan serta jasa).

Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan, khususnya pengembangan kawasan-kawasan perbelanjaan dan perdagangan baru terutama di pusat perkotaan serta sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada dengan memperhatikan keserasiannya dengan lingkungan, maka jumlah hotel dan restoran juga semakin

meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pajak Parkir merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Di mana diharapkan apabila penerimaan dari jasa Pajak Parkir meningkat, maka penerimaan pajak daerah pun akan meningkat yang sekaligus juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemungutan Pajak Parkir didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Di Kota Pekanbaru terdapat 33 Wajib Pajak (WP) Parkir. Yang mempunyai setoran lima terbesar adalah Parkir Mall SKA, Pakir Pasar Sukaramai Ramayana, Parkir Mall Ciputra, Parkir Bandara SSQ II, dan Parkir Citra Plaza. Perubahan pajak parkir akan tidak selalu diikuti oleh perubahan pajak daerah. Rata-rata perkembangan Pajak Parkir selama tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah sebesar 26,48% pertahun, sedangkan pajak daerah sebesar 18,51%. Salomo dan Ikhsan (2002:96) mengungkapkan bahwa dalam kondisi normal potensi Pajak Parkir diperkirakan akan terus berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang dinamis.

### **Kinerja Pajak Daerah**

Analisis selanjutnya adalah analisis mengenai kinerja pajak daerah, yang terdiri dari tiga hal yaitu analisis mengenai tax effort yang mencakup elastisitas pajak daerah (tax elasticity) kemudian tax effectiveness (hasil guna) serta terakhir adalah tax efficiency.

#### ***Tax Elasticity (Elastisitas Pajak)***

Analisis elastisitas pajak atau yang sering juga disebut tax bouyancy dengan melihat seberapa besar perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak daerah dengan persentase perubahan PDRB. Hal ini adalah untuk melihat kepekaan perubahan PDRB tahun depan yang disebabkan perubahan penerimaan pajak daerah tahun sekarang.

Rata-rata prosentase perubahan pajak Parkir terhadap prosentase perubahan PDRB adalah sebesar 2,13. Hal ini berarti selama periode 2008 - 2012, jika pajak tahun sekarang sebesar 1% maka PDRB pada tahun yang akan datang akan meningkat sebesar 2,13%. Angka ini ter-

lihat sangat kecil. Hal ini berarti setiap terdapat perubahan PDRB, maka penerimaan pajak daerah tidak berubah secara signifikan, dengan demikian jika Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak Parkir dalam rangka meningkatkan PDRB adalah kebijakan yang kurang tepat. Namun jika upaya peningkatan pajak Parkir adalah dalam rangka meningkatkan PAD adalah tepat, sebab rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD cukup signifikan, yaitu sebesar 5,01%. Hal ini cukup penting karena PAD dipandang sebagai ciri kemandirian suatu daerah.

### ***Tax Effort (Upaya Pajak)***

Pengukuran efektifitas pajak dilakukan dengan menggunakan Tax Performance Index (TPI). TPI diperoleh dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dengan target Pajak Parkir. Pengukuran efektifitas ini dilakukan dengan data mengenai target penerimaan pajak parkir. Pengukuran efektifitas diperoleh dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dengan Rencana Penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

Tax effort (upaya pajak) yang merupakan pencapaian rasio atau tingkat efektifitas pemungutan pajak parkir sudah di atas target kecuali pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak parkir di atas angka yang ditargetkan, artinya upaya Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam memperoleh Pajak Parkir sudah baik dan perlu ditingkatkan.

### ***Administrasi Pajak Parkir***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa administrasi pengelolaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini terlihat dari sudah adanya penjabaran tugas pada masing-masing bidang dan seksi, rincian tugas yang diberikan terhadap Seksi Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan serta Penetapan sudah jelas, koordinasi antar Bidang-Bidang sudah terkelola dengan baik

### ***Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD***

Kontribusi pajak parkir terhadap PAD untuk Tahun 2012 sebesar 6,06%. Hal ini

memperlihatkan bahwa Pendapatan Pajak Parkir cukup memberikan kontribusi yang begitu berarti terhadap PAD, karena PAD masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah. Berpedoman kepada pertumbuhan lahan parkir Kota Pekanbaru dan meningkatnya jumlah kendaraan, angka tersebut masih rendah, karena lahan parkir terus tumbuh dan memperlihatkan potensi yang besar untuk ditagih pajaknya.

### ***Kinerja Pajak Parkir***

Handoko (2003) menjelaskan efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari suatu organisasi. Pajak parkir dapat dikatakan efektif apabila selisih realisasi penerimaan dan target yang dianggarkan mengalami selisih positif (lebih dari 100%) dan dikatakan kurang atau tidak efektif apabila selisih dari realisasi dengan target yang dianggarkan mengalami selisih negatif (kurang dari 100%).

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak Parkir di kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang dianggarkan dengan realisasi penerimaan pajak parkir dalam tahun yang sama. Pemungutan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun anggaran 2008 s/d 2012, meskipun pada tahun anggaran 2009 dan 2010 realisasi penerimaan untuk pajak parkir tidak mencapai target. Di tahun anggaran 2008, anggaran yang telah ditetapkan untuk pajak adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 dan terealisasi Rp3.013.082.386,00, maka tingkat keefektifitasnya adalah 133,91%. Di tahun anggaran 2009, anggaran yang telah ditetapkan untuk pajak parkir adalah sebesar Rp3.377.900.000,00 namun terealisasi Rp2.935.975.475,00, maka tingkat keefektifitasnya adalah 86,92%. Di tahun anggaran 2010, anggaran yang telah ditetapkan untuk pajak parkir adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 namun terealisasi Rp 3.911.436.114,00, maka tingkat keefektifitasnya adalah 78,23%.

Tahun anggaran 2011 terjadi peningkatan, anggaran yang telah ditetapkan untuk pajak parkir adalah sebesar Rp4.110.000.000,00 dan terealisasi Rp4.472.944.458,00, maka tingkat keefektifitasnya adalah 108,83%. Di tahun anggaran 2012, anggaran yang telah ditetapkan untuk pajak parkir adalah sebesar Rp7.147.640.829,00 dan terealisasi Rp7.196.883.291,00, maka tingkat keefektifitasnya adalah 100,69%. Realisasi penerimaan pajak parkir mulai tahun 2011 selalu melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Kota Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru sudah efektif karena tingkat pencapaian target di atas 100%.

## SIMPULAN

Pajak parkir cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD untuk Tahun 2012 sebesar 6,06%. Hal ini memperlihatkan bahwa Pendapatan Pajak Parkir cukup memberikan kontribusi yang begitu berarti terhadap PAD, karena PAD masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah. Berpedoman kepada pertumbuhan lahan parkir Kota Pekanbaru dan meningkatnya jumlah kendaraan, angka tersebut masih rendah, karena lahan parkir terus tumbuh dan memperlihatkan potensi yang besar untuk ditagih pajaknya.

Pemungutan pajak parkir dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun anggaran 2008 s/d 2012, meskipun pada tahun anggaran 2009 dan 2010 realisasi penerimaan untuk pajak parkir tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak parkir mulai tahun 2011 selalu melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Kota Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa Kota Pekan-

baru sudah efektif karena tingkat pencapaian target di atas 100%.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bird, Richard M. & Francois Vaillancourt, 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Gramedia
- Devas, Nick dkk., 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Handyaningrat, Soewarno, 1990, *Pengantar Study Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Kasim, Azhar, 1993, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Koswara, E., 2001. *Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Partadiredja, Ace, 1994. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. LP3ES. Jakarta
- Sidik, Machfud, 1996, *Keuangan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Siagian, Sondang P., 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Soelarno, Slamet. 1999, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: STIA LAN Press
- Soemitro, Rochmat, 1992, *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- Suparmoko, 1997, *Keuangan Negara*. BPFE Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Susanti, Hera, Mokh Ikhsan & Widayani., 2000, *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.